



RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang terarah, profesional, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah;
- b. bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat arah kebijakan perangkat daerah yang berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renja PD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2025
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH



Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

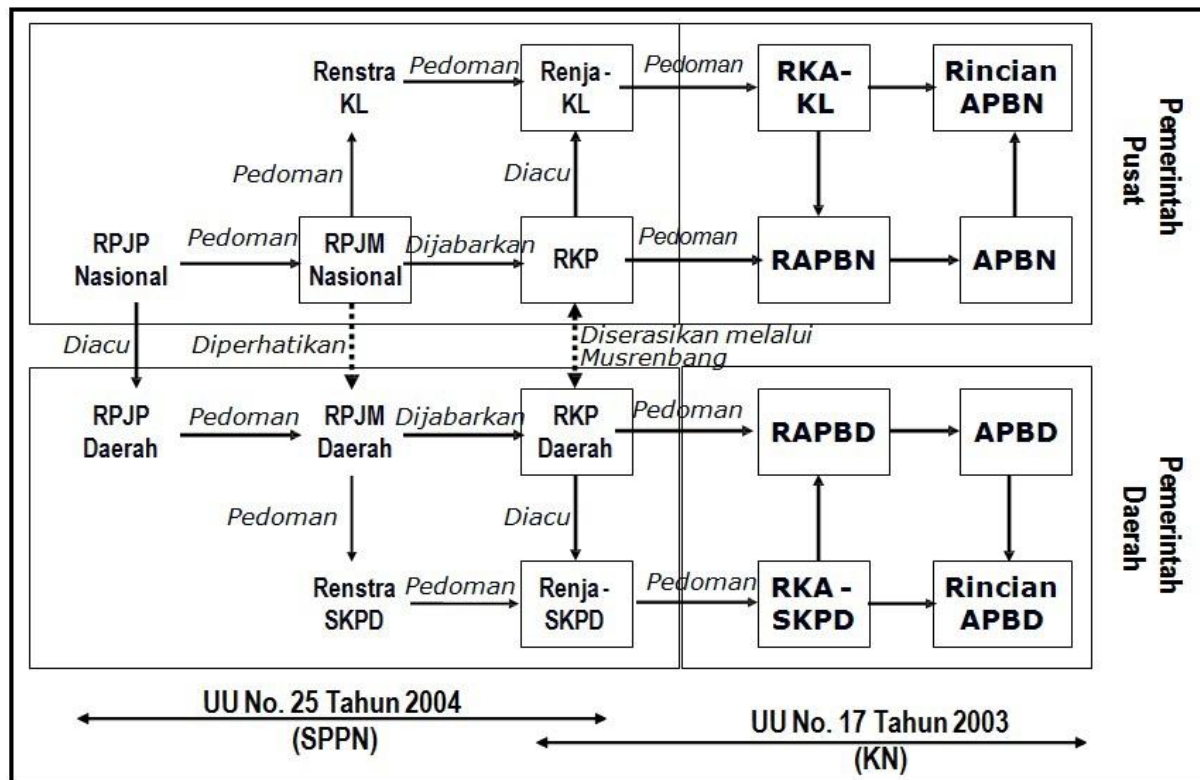
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Sekretariat DPRD. Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA Tahun 2026 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2026.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar tersebut menjelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan,
- Penyusunan rancangan awal,
- Penyusunan rancangan,
- Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- Perumusan rancangan akhir, dan
- Penetapan.

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 48);
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 32).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
- 2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mencakup:

1. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024,
2. Evaluasi Tahun 2024 tersebut dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program, kegiatan, subkegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2024 dan perkiraan realisasi Tahun 2025.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2024. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan

Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) = (7/6)	-9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	85	83	85	85	100%	85 angka	253	298%
4.02.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	85	100	85	85	100%	85 persen	270	318%
4.02.0 1.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	7	5	5	100%	5 dokumen	17	85%
4.02.0 1.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	6	6	6	100%	6 laporan	18	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) = (7 / 6)	-9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85	100	85	85	100%	85 persen	270	318%
4.02.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156	39	39	39	100%	39 orang/ bln	117	75%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	12	12	12	100%	12 dokumen	36	75%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	84	21	21	21	100%	21 laporan	63	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) = (7 / 6)	-9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10 / 4)
		n/Semesteran SKPD								
4.02.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85	98,44	85	85	100%	85 persen	268,44	316%
4.02.0 1.2.05 .09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	160	126	40	40	100%	40 orang	206	129%
4.02.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85	100	85	85	100%	85 persen	270	318%
4.02.0 1.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28	7	7	7	100%	7 paket	21	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) = (7 / 6)	-9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.0 1.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	2	2	2	100%	2 paket	6	75%
4.02.0 1.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	8	2	2	2	100%	2 dokumen	6	75%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	12	12	12	100%	12 laporan	36	75%
4.02.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	12	12	12	100%	12 laporan	36	75%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48	12	12	12	100%	12 dokumen	36	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) = (7 / 6)	-9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85	100	85	85	100%	85 persen	270	318%
4.02.0 1.2.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	12	12	12	100%	12 laporan	36	75%
4.02.0 1.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	12	12	12	100%	12 laporan	36	75%
4.02.0 1.2.06 .02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	12	12	12	100%	12 laporan	36	75%
4.02.0 1.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	48	12	12	12	100%	12 laporan	36	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) = (7/6)	-9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Disediakan								
4.02.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85	100	85	85	100%	85 persen	270	318%
4.02.0 1.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16	4	4	4	100%	4 unit	12	75%
4.02.0 1.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	164	39	41	41	100%	41 unit	121	74%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) = (7 / 6)	-9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.0 1.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20	20	20	100%	20 unit	60	300%
4.02.0 1.2.09 .10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	6	6	6	6	100%	6 unit	18	300%
4.02.0 1.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	85	68,89	85	85	100%	85 persen	238,89	281%
4.02.0 1.2.15 .01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	360	14	45	45	100%	45 orang/ bln	104	29%
4.02.0 1.2.15 .02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	20	272	5	5	100%	5 paket	282	1410%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) = (7 / 6)	-9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.0 1.2.15 .03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	360	3	45	10	22%	45 orang	58	16%
4.02.0 1.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD	85	100	85	85	100%	85 persen	270	318%
4.02.0 1.2.16 .03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	48	12	6	6	100%	12 laporan	30	63%
4.02.0 2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	90	83	86	84	98%	88%	255	283%
4.02.0 2.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	85	100	85	85	100%	85 persen	270	318%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) = (7 / 6)	-9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.0 2.2.01 .01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	24	6	6	6	100%	6 dokumen	18	75%
4.02.0 2.2.01 .02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	36	9	8	8	100%	9 dokumen	26	72%
4.02.0 2.2.01 .03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan	20	4	5	5	100%	5 dokumen	14	70%
4.02.0 2.2.01 .04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keteran gan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5	2	5	5	100%	5 dokumen	12	240%
4.02.0 2.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan	85	100	85	85	100%	85 persen	270	318%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) = (7 / 6)	-9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Anggaran								
4.02.0 2.2.02 .03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	32	8	4	4	100%	8 dokumen	20	63%
4.02.0 2.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	85	100	85	85	100%	85 persen	270	318%
4.02.0 2.2.03 .07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	64	16	8	8	100%	16 dokumen	40	63%
4.02.0 2.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	85	89,81	85	82	96%	85 persen	256,81	302%
4.02.0 2.2.04 .02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	25	6	3	3	100%	6 dokumen	15	60%
4.02.0 2.2.04 .04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	164	3	42	0	0%	42 orang	45	27%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) = (7 / 6)	-9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.0 2.2.04 .05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	384	96	96	82	85%	96 orang	274	71%
4.02.0 2.2.04 .06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	528	131	130	130	100%	132 dokumen	393	74%
4.02.0 2.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	85	100	85	85	100%	85 persen	270	318%
4.02.0 2.2.05 .03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	16	4	3	3	100%	4 dokumen	11	69%
4.02.0 2.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	85	100	85	85	100%	85 persen	270	318%
4.02.0 2.2.06 .02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	4	1	1	1	100%	1 laporan	3	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) = (7 / 6)	-9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.0 2.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	85	100	85	85	100%	85 persen	270	318%
4.02.0 2.2.08 .01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	80	20	15	15	100%	20 dokumen	55	69%
4.02.0 2.2.08 .02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	4	1	1	1	100%	1 laporan	3	75%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	16	4	1	1	100%	4 dokumen	9	56%
4.02.0 2.2.08 .04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	240	60	30	30	100%	60 dokumen	150	63%

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target
Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapai
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapai
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapai
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapai
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapai
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tercapai
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tercapai
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai Sekretariat DPRD terdapat beberapa pegawai yang tidak dapat mengikuti kegiatan dikarenakan sakit atau alasan lain.
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai Sekretariat DPRD terdapat beberapa pegawai yang tidak dapat mengikuti kegiatan dikarenakan sakit atau alasan lain.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapai
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapai

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercapai
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tercapai
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tercapai
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapai
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tercapai
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapai
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapai
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapai
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapai
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapai
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapai
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tercapai
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tercapai
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercapai
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tercapai
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Beberapa fasilitas anggota dewan yang wajib dianggarkan setiap tahun namun tidak digunakan oleh anggota dewan terutama medical check-up

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tercapai
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tercapai
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Dikarenakan anggota DPRD tidak mengambil fasilitas medical check-up ini sedangkan fasilitas ini harus selalu dianggarkan setiap tahunnya menurut aturan undang-undang
	Layanan Administrasi DPRD	Tercapai
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tercapai
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Secara umum akibat volume perencanaan di DPA terutama pada beberapa kegiatan/sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan fasilitasi kegiatan dewan dianggarkan secara penuh untuk 45 anggota dewan, namun dalam pelaksanaannya tidak semua anggota yang memanfaatkan/melaksanakan anggaran tersebut. Pada level nasional pun tidak terdapat standar maupun kerangka kebijakan Kementerian/ Lembaga terkait, yang dapat diacu baik dari sisi perencanaan, evaluasi, maupun pelaporan
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tercapai
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Tercapai
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tercapai
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Tercapai
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Tercapai
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Tercapai
	Pembahasan APBD	Tercapai
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tercapai

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Tercapai
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kinerja kegiatan ini tidak tercapai terutama karena capaian penyediaan kelompok pakar dan tim ahli yang rendah
	Pendalaman Tugas DPRD	Tercapai
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Harus dianggarkan karena amanat undang-undang namun pimpinan dan alat kelengkapan dewan belum menghendaki adanya pengadaan tim pakar dan tim ahli lagi
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tercapai
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyediaan hadiah untuk kegiatan Bantul Expo tidak jadi terlaksana
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tercapai
	Pelaksanaan Reses	Tercapai
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Tercapai
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Tercapai
	Fasilitasi Tugas DPRD	Tercapai
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Tercapai
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tercapai
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Tercapai
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Tercapai

2. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kerjasama yang baik seluruh jajaran Sekretariat DPRD dalam menentukan perencanaan kebutuhan anggaran serta evaluasi kegiatan secara periodik.
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ketegasan jajaran pimpinan OPD dalam memutuskan sub. kegiatan yang akan diambil dalam perubahan renstra
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi antar kepala bagian dan kepala OPD lebih baik
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Merupakan kegiatan rutin yang jumlah volume serta anggaran kebutuhan dapat ditentukan dengan cukup jelas
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kegiatan rutin serta didukung sistem yang sudah terintegrasi dan lancarnya komunikasi dengan BPKPAD
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun serta didukung koordinasi yang baik dari para pemangku kebijakan.
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun serta didukung koordinasi yang baik dari para pemangku kebijakan.
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun serta didukung koordinasi yang baik dari para pemangku kebijakan
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan	SDM yang baik dan koordinasi

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	yang baik dengan internal maupun eksternal Setwan khususnya pihak ketiga.
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun serta didukung koordinasi yang baik dari para pemangku kebijakan.
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyesuaian kebutuhan dan target kegiatan pada DPA perubahan
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Perencanaan yang baik serta merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perencanaan yang baik serta merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan yang baik serta merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perencanaan yang baik serta merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SDM yang baik, perencanaan yang matang
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan identifikasi kebutuhan pemeliharaan yang akurat terutama pada kendaraan dinas dan pemeliharaan gedung Sekwan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Perencanaan dan koordinasi yang

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	baik dari para pengampu kegiatan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perencanaan dan koordinasi yang baik dari para pengampu kegiatan Administrasi yang baik oleh pengelola gaji dewan
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rekanan yang lebih baik dan kooperatif
	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Perencanaan yang baik serta merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun
	Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
2	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan semua stakeholder kegiatan pembentukan peraturan daerah baik di internal maupun eksternal Sekretariat DPRD
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	SDM yang baik dan adanya materi hukum yang cukup dan mendukung
	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan dan OPD terkait serta adanya materi yang cukup

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		dan mendukung
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan dan SDM yang baik
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	SDM yang baik dan adanya materi hukum yang cukup dan mendukung
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan dan OPD terkait
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan dan OPD terkait
	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan dan OPD terkait
	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan dan OPD terkait
	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Perencanaan matang terkait kebutuhan reses berdasarkan evaluasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya dan koordinasi yang baik dengan anggota dewan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Perencanaan matang terkait kebutuhan reses berdasarkan evaluasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya dan koordinasi yang baik dengan anggota dewan
	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan
	Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas	

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	DPRD	
	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan
	Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Koordinasi yang baik dengan pimpinan dewan

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2026 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan, khususnya dengan anggota Dewan terkait rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang, sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, terukur, dan efektif;
2. Lebih mengoptimalkan fungsi Asdeski (Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia) sebagai wahana komunikasi antar Sekretariat DPRD seluruh Indonesia.
3. Meningkatkan kesadaran dan komitmen semua pemangku kepentingan terhadap tugas dan kewajiban sehingga semua program kegiatan pada tahun mendatang dapat terlaksana sesuai target;
4. Optimalisasi fungsi perencanaan, monitoring, dan evaluasi penganggaran setiap kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul agar capaian kinerja dan keuangan maksimal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut,

analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi			Target	
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama	Persen (%)	92,31	91,67	100	78	80
	Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD	Persen (%)	100	100	100	100	100

Sesuai pencapaian IKU Sekretariat DPRD Tahun 2024 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa IKU Sekretariat DPRD yang dapat memenuhi target adalah Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama. IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. kinerja yang baik dari Sekretariat DPRD dari mulai perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi setiap program dan kegiatan;
- b. komitmen seluruh pegawai Sekretariat DPRD, pimpinan dan anggota DPRD dalam menjalankan kegiatan yang telah tersusun;
- c. koordinasi dan kerja sama yang baik dengan internal maupun eksternal Sekretariat DPRD.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Sekretariat DPRD Tahun 2024 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan

pada Tahun 2026 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. capaian IKU tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya selalu melebihi target yang ditetapkan. Oleh karenanya pada tahun 2026, kinerja yang baik perlu dipertahankan, terutama dari sisi fasilitasi kegiatan kedewanan.
2. Berdasarkan evaluasi tahun 2024, terdapat deviasi yang cukup tinggi antara target dan realisasi keuangan, maka pada tahun 2026 perlu peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi anggaran sehingga capaian kinerja keuangan dapat optimal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Administrasi Pemerintahan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen dan kebersamaan yang tinggi dari ASN Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Sulitnya mencapai serapan anggaran optimal di setiap tahun anggaran.
Dukungan sarana dan prasarana yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD	Jumlah ASN yang memiliki sertifikasi barang dan jasa masih terbatas.
Dukungan Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, serta staf sekretariat fraksi dalam memperlancar tugas dan fungsi kedewanan.	Pelaksanaan kegiatan Badan Musyawarah DPRD tidak sesuai dengan ROPK yang telah disusun
Koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait	Terbatasnya ASN Sekretariat DPRD dengan sertifikasi penyusunan perancang perundang-undangan.

Selain itu, selama Tahun 2024 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Peluang	Tantangan
Dengan adanya pergantian anggota DPRD periode 2024-2029, Sekretariat DPRD memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas fasilitasi bagi anggota DPRD baru dalam menjalankan tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan.	Pergantian anggota DPRD periode 2024-2029 menuntut Sekretariat DPRD untuk menyesuaikan pola kerja dengan anggota baru, termasuk dalam fasilitasi pembentukan alat kelengkapan DPRD dan orientasi bagi anggota DPRD baru.
Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam layanan kepada DPRD dan masyarakat.	Dicabutnya Peraturan Presiden nomor 53 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional
Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD	Kemajuan digital menuntut ASN harus mengikuti perkembangan digitalisasi untuk mempercepat kinerja pelayanan kepada masyarakat
Kesempatan untuk memanfaatkan pelatihan dan bimbingan teknis dari lembaga terkait, seperti Asosiasi Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI), guna meningkatkan kapasitas ASN dalam mendukung tugas DPRD, khususnya dalam penyusunan perundang-undangan dan pelayanan administrasi legislatif.	Makin tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan profesionalisme anggota dewan maupun aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas Kedewanan secara berkesinambungan.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka strategi pada Tahun 2026 yang akan dilakukan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program dan kegiatan, terutama menyikapi dinamisnya kegiatan anggota dewan.

2. Penyusunan standar kinerja yang realistis dan terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;
3. Efisiensi penggunaan anggaran, terkait dengan program Pemerintah Daerah untuk mengurangi defisit anggaran sehingga harus diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;
4. Optimalisasi pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat DPRD Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026				
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Bantul	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	46.287.569.645	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	37.277.663.227
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	85 persen	74.669.100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	85 persen	56.100.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	37.334.550	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	28.050.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	37.334.550	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	28.050.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Keuangan Perangkat Daerah	85 persen	5.667.396.266	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Keuangan Perangkat Daerah	85 persen	6.175.098.453
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/bln	5.297.834.548	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang /bln	6.013.428.453

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026				
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	336.286.718	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	133.620.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	21 Laporan	33.275.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	21 laporan	28.050.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85 persen	264.416.460	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85 persen	325.400.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	264.416.460	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	325.400.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat	85 persen	3.092.277.918	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85 persen	1.984.629.838

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026				
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
			Daerah							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	1.402.779.027	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	1.318.004.838
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	219.782.446	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	38.330.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	154.608.960	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	70.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	75.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	140.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	1.165.107.485	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	410.295.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	75.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	8.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 persen	1.267.767.600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 persen	1.749.728.160

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026				
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	58.560.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	60.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	52.707.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	15.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	242.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	96.200.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	914.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.578.528.160
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 persen	2.212.946.404	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 persen	1.075.458.184
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	388.989.409	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	342.474.850

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026				
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	577.946.155	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	509.073.600
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	262.176.973	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	20.890.400
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	983.833.867	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	203.019.334
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	85 persen	33.209.982.050	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	85 persen	25.522.948.592
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 orang/bulan	32.556.737.232	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 orang /bulan	25.023.928.592
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 paket	554.418.068	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 paket	431.520.000
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 orang	98.826.750	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 orang	67.500.000

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026				
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Layanan Administrasi DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD	85 persen	498.113.847	Layanan Administrasi DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD	85 persen	388.300.000
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	498.113.847	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 laporan	388.300.000
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kab. Bantul	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	90%	9.980.250.903	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kab. Bantul	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	88%	28.085.363.500
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	85 persen	2.937.545.996	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	85 persen	6.972.565.500
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 dokumen	976.704.900	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 dokumen	3.465.934.000
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 dokumen	1.663.139.895	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 dokumen	3.264.561.000

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026				
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	278.587.571	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	105.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 dokumen	19.113.630	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 dokumen	137.070.500
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	85 persen	1.097.452.333	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	85 persen	8.640.270.000
	Pembahasan APBD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	8 dokumen	1.097.452.333	Pembahasan APBD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	8 dokumen	4.310.152.000
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	85 persen	2.262.378.246	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	85 persen	4.330.118.000
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	16 dokumen	2.262.378.246	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	16 dokumen	4.330.118.000
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	85 persen	1.113.083.319	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	85 persen	4.194.171.000
	Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	610.372.522	Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	2.610.281.000

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026				
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Bantul	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	42 orang	11.353.904	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Bantul	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	42 orang	315.000.000
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	96 orang	140.254.108	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	96 orang	255.750.000
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	132 dokumen	351.102.785	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	132 dokumen	1.013.140.000
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	85 persen	716.737.632	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	85 persen	1.739.237.500
	Pelaksanaan Reses	Kab. Bantul	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	4 dokumen	716.737.632	Pelaksanaan Reses	Kab. Bantul	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	4 dokumen	1.739.237.500
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	85 persen	242.101.967	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	85 persen	907.442.000
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 laporan	242.101.967	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 laporan	907.442.000
	Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	85 persen	1.610.951.410	Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	85 persen	5.631.677.500
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20 dokumen	985.316.168	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20 dokumen	2.985.924.000

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026				
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	7.096.190	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	173.140.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 dokumen	404.470.141	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 dokumen	2.219.937.000
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60 dokumen	214.068.911	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60 dokumen	252.676.500

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2026 serta tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku
Kepentingan/Masyarakat
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		NIHIL			

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif" dengan Prioritas Nasional meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/*quick wins* sebagai berikut:

Tabel 3.1 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.	2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.	4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Pemberantasan kemiskinan.	5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.	
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.	
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.	
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan	

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
internasional yang kondusif. 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup. 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik-mandiri lainnya. 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. 16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah. 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.	menghilangkan kemiskinan absolut. 6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara. 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2026 tersebut, maka kebijakan dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Sekretariat DPRD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas dan berbasis aspirasi masyarakat;
2. Meningkatkan penyelenggaraan forum aspirasi publik (*public hearing*) dan kunjungan kerja DPRD ke masyarakat secara inklusif;
3. Meningkatkan kapasitas SDM Sekretariat DPRD melalui pelatihan fungsional, teknis legislasi, dan pengelolaan informasi;
5. Menyediakan sarana kerja yang ramah difabel dan mengedepankan kesetaraan gender dalam setiap kegiatan kelembagaan;
6. Mendorong transparansi dan akuntabilitas kerja DPRD melalui publikasi rutin kinerja DPRD kepada masyarakat;
7. Mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi di lingkungan Sekretariat DPRD (misalnya aplikasi layanan informasi publik Jarimas)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Tahun 2026 dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah "Penguatan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan" dengan Prioritas Daerah (PD) sesuai Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
- PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
- PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
- PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
- PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Sekretariat DPRD serta tujuan dan sasaran dalam Rancangan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline		Target 2026
					Realisasi 2024	Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terwujudnya penerbitan produk hukum		Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD	Persen	100	100	100
		Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD	Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD	Indeks	95,54	94,72	94,91

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Tahun 2026 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Bantul

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						42.663.459.818,00							55.229.187.282,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						42.663.459.818,00							55.229.187.282,00		
	4	0 2				SEKRETARIAT DPRD						42.663.459.818,00							55.229.187.282,00		
1	4	0 2	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	-			82 angka	15.725.326.418,00						-	45.248.936.379,00		
	4	0 2	0 1	2.0 1		Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			85 persen	53.040.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat DPRD	-	74.669.100,00		
	4	0 2	0 1	2.0 1	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	24.990.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat DPRD		37.334.550,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	0 2	0 1	2.0 1	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	28.050.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat DPRD		37.334.550,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	0 2	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			85 persen	6.565.141.453,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat DPRD	-	5.667.396.266,00		
	4	0 2	0 1	2.0 2	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/b ulan	6.406.551.453,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat DPRD		5.297.834.548,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	0 2	0 1	2.0 2	00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	133.600.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat DPRD		336.286.718,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	0 2	0 1	2.0 2	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				21 Laporan	24.990.000,00	Kab. Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat DPRD		33.275.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	0 2	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administراسي Kepegawaian Perangkat Daerah	-			85 persen	234.956.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat DPRD	-	264.416.460,00	
	4	0 2	0 1	2.0 5	00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	234.956.000,00	Kab. Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat DPRD		264.416.460,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	0 2	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administراسي Umum Perangkat Daerah	-			85 persen	1.981.088.692,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat DPRD	-	2.872.495.472,00	
	4	0 2	0 1	2.0 6	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	1.352.941.692,00	Kab. Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat DPRD		1.402.779.027,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	0 2	0 1	2.0 6	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	67.200.000,00	Kab. Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat DPRD		154.608.960,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	0 2	0 1	2.0 6	00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	140.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat DPRD		75.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	0 2	0 1	2.0 6	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	412.947.000,00	Kab. Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat DPRD		1.165.107.485,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	0 2	0 1	2.0 6	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	104.942.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat DPRD		983.833.867,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	0	0	2	1	2.1	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-		85 persen	4.156.661.649,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD	-	33.209.982.050,00					
	4	0	0	2	1	2.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														00	01		
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/Bulan	3.648.743.949,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD		32.556.737.232,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	0	0	2	1	2.1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														00	02		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				5 Paket	439.667.700,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD		554.418.068,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	0	0	2	1	2.1	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														00	03		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	68.250.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD		98.826.750,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
2	4	0	0	2	2		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi	-		100 %	26.938.133.400,00						-	9.980.250.903,00					
	4	0	0	2	2	2.0	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-		85 persen	6.858.529.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD	-	2.937.545.996,00					
	4	0	0	2	2	2.0	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														00	01		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				6 Dokumen	3.366.490.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD		976.704.900,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	0	0	2	2	2.0	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														00	02		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				9 Dokumen	3.254.741.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD		1.663.139.895,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
												Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
																Nasional	Daerah								
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	4	0	0	2	2.0	00	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan					5 Dokumen	104.999.900,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD		278.587.571,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	0	0	2	2.0	00	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi					5 Dokumen	132.298.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD		19.113.630,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	0	0	2	2.0		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	-			85 %	4.202.218.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD	-	1.097.452.333,00					
	4	0	0	2	2.0	00	Pembahasan APBD																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD					8 Dokumen	4.202.218.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD		1.097.452.333,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	0	0	2	2.0		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-			85 %	4.745.265.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD	-	2.262.378.246,00					
	4	0	0	2	2.0	00	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran					16 Dokumen	4.745.265.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD		2.262.378.246,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	0	0	2	2.0		Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	-			82 persen	4.271.081.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD	-	1.113.083.319,00					
	4	0	0	2	2.0	00	Pendalaman Tugas DPRD																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD					6 Dokumen	2.715.291.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD		610.372.522,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	0	0	2	2.0	00	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
												Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
																Nasional	Daerah								
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
								Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				42 Orang	314.400.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD		11.353.904,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	0 2	0 2	2.0 4	00 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																			
								Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				96 Orang	255.750.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD		140.254.108,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	0 2	0 2	2.0 4	00 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																			
								Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				132 Dokumen	985.640.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD		351.102.785,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	0 2	0 2	2.0 5		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	-				85 persen	1.737.212.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD	-	716.737.632,00					
	4	0 2	0 2	2.0 5	00 03	Pelaksanaan Reses																			
								Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				4 Dokumen	1.737.212.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD		716.737.632,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	0 2	0 2	2.0 6		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	-				85 persen	599.044.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD	-	242.101.967,00					
	4	0 2	0 2	2.0 6	00 02	Pengawasan Kode Etik DPRD																			
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	599.044.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD		242.101.967,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	0 2	0 2	2.0 8		Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	-				85 persen	4.524.783.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD	-	1.610.951.410,00					
	4	0 2	0 2	2.0 8	00 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																			
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				20 Dokumen	2.980.510.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD		985.316.168,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				

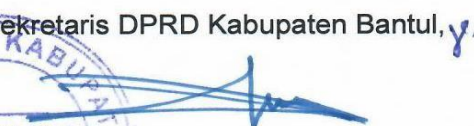
No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	4	0	0	2.0	00	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
							Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	173.680.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD		7.096.190,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	0	0	2.0	00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				4 Dokumen	1.154.710.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD		404.470.141,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	0	0	2.0	00	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				60 Dokumen	215.883.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD		214.068.911,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	J U M L A H											42.663.459.818,00								55.229.187.282,00				

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2026. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2026. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2026. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul, 



PRAPTA NUGRAHA, S.Sos., MH.
NIP. 197112171991011001